



DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP MENINGKATNYA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI SULAWESI BARAT**Oleh****Awal Nopriyanto Bahasoan¹⁾, Wulan Ayuandiani²⁾, Aswar Rahmat³⁾, Muhammad Mukhram⁴⁾****^{1,2,3,4}Program Studi Manajemen Universitas Sulawesi Barat****Email: ¹awalnopriyanto@unsulbar.ac.id****Abstract**

At the beginning of 2020, precisely in March, Indonesia was shocked by a phenomenon Covid-19 pandemic. As of December 2020, the total number of cases in Indonesia has reached 700,000 cases of Covid-19 sufferers in 34 provinces. The spread and increase in cases took place very quickly and had an effect on the decline in the economy. This study aims to determine the level of poverty and unemployment that occurred during the Covid-19 pandemic. Poverty and unemployment are problems that are already difficult to overcome by various countries, including Indonesia, which is characterized by an increasing population level, difficulty in finding jobs and low human resources. Unemployment and poverty have a correlative relationship where the higher the unemployment rate, the higher the poverty rate. Therefore, an appropriate solution is needed for the government in dealing with periods of increasing unemployment and poverty during the Covid-19 pandemic. It is hoped that in the future, the central government and provincial/regional/district governments can provide support that will have an impact on the welfare of the population and the country's economy.

Keywords: Covid-19, Pandemic, Economy, Poverty**PENDAHULUAN**

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan suatu kejadian yang diduga sebuah kasus pneumonia yang etiloginya tidak diketahui kasus tersebut berasal dari kota Wuhan, China. China mengidentifikasi pneumonia tersebut pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai jenis baru corona virus. Pernyataan “urgent notice on the treatment of pneumonia of unknow cause” telah dikeluarkan oleh Wuhan Municipal Health Committe (Hanoatubun,2020)

Pandemi virus corona (covid 19) mengimpeksi berbagai lini kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi bahkan sosial. Pada perekonomian sendiri, pandemi Covid 19 membuat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II menjadi minus 5,32%. Dari sektor ketenagakerjaan misalnya, berimbas pada karyawan yang dirumahkan hingga berimbas kepada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Inspektur Jendral Kementrian Keuangan, Sumiyati mengatakan “Angka kemiskinan dan pengangguran diperkirakan akan naik cukup signifikan sebagai imbas adanya pandemi. Angka pengangguran dan juga angka kemiskinan mengalami peningkatan, dimana kemiskinan kemungkinan naik 3,02 hingga 5,71 juta orang dan pengangguran meningkat 5,23 juta orang” jelas Sumiyati saat webinar sinergi pengawasan APIP-SPI-APH pada selasa (29/9). Dengan adanya

Pandemi, Sumiyati mengatakan pertumbuhan pendapatan negara menjadi negatif, dimana per 31 Agustus lalu tercatat pertumbuhan negatif sebesar 13,11% year on year sedangkan belanja negara positif sebesar 10,56%. “Pendapatan tumbuh negatif, belanja tumbuh positif berarti kondisi anggaran akan mengalami defisit. Defisit anggaran sudah di level 3,05% terhadap PDB ini masih posisi bulan Agustus lalu,” imbuhnya.



Kalangan pengusaha menilai Covid-19 telah membawa dampak negatif besar bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya Covid-19 telah mengganggu mata rantai produksi industri, sehingga perputaran bisnis menjadi tidak lancar sementara kewajiban para pengusaha tetap berjalan. Akibatnya banyak karyawan yang dirumahkan bahkan harus rela kehilangan pekerjaan karena di PHK. Dampak melemahnya industri saat ini tidak hanya terjadi di daerah episentrum Covid-19 seperti Jakarta, melainkan juga terjadi pada daerah Sulawesi Barat. Nilai rupiah terus menurun sedangkan pasar bursa pun meradang seiring laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi tidak stabil. Hal ini semakin memperkuat bahwa perekonomian Indonesia akan terus melambat. Salah satu cara pemerintah dalam menangani laju penyebaran Covid - 19 adalah dengan menerapkan PSBB dan sosial atau physical distancing. Akan tetapi hal tersebut berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di beberapa wilayah yang terindikasi mempercepat penyebaran Covid-19.

PHK yang dilakukan oleh perusahaan membawa dampak besar bagi masyarakat tercatat pada bulan April 2020, dimana saat virus Covid-19 baru menyebar di Indonesia, terdapat 1.225 orang karyawan yang dirumahkan dari sepuluh perusahaan di Sulawesi Barat, selanjutnya terdapat 8 orang di PHK dari dua perusahaan di Sulawesi Barat. Hal ini berdasarkan pendapat Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Barat, Maddareski Salatin. PHK menjadi penyebab hilangnya pekerjaan bagi masyarakat dan menyebabkan jumlah pengangguran meningkat merupakan masalah sulit yang harus diatasi oleh pemerintah dan menjadi masalah baru bagi negara dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat.

Wilayah Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah yang secara umum memiliki kualitas sumber daya manusia cukup rendah. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat bekerja tanpa keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan masih rendah, sehingga penghasilan yang mereka diperoleh hanya

sedikit dan kadang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saat Pandemi Covid-19 menyebabkan kondisi semakin sulit, khususnya dalam mencari pekerjaan. Pada bulan Maret 2020, persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat meningkat sebesar 10,8% setelah adanya pandemi Covid-19. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat di Sulawesi Barat adalah dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat di berbagai sektor kehidupan, seperti bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Modal Usaha UMKM dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis literatur review berhubungan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap pengangguran dan kemiskinan yang meningkat di setiap wilayah, salah satunya di Provinsi Sulawesi Barat. Tulisan literatur review ini digunakan untuk mengetahui kebijakan yang telah berlaku di Indonesia dalam menangani kasus Covid-19 serta melihat dampak Covid-19 terhadap pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kepustakaan atau literatur review yang merupakan kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan berbagai macam referensi yang sejenis dengan pembahasan seperti artikel, buku, prosiding seminar dan jurnal (Sari & Asmendri, 2020). Pencarian literatur nasional dan internasional dilakukan dengan sumber data yang diperoleh dari database Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Microsoft Academic, dan Portal Garuda Publikasi Indonesia Index (IPI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gunawan Somodiningrat (1998) menjelaskan bahwa kemiskinan dibedakan dalam kemiskinan absolut dan kemiskinan



relatif. Dikatakan kemiskinan absolut apabila tingkat pendapatan berada dibawah garis kemiskinan, atau pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup minimum tersebut dapat diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah diatas garis kemiskinan.

Berdasarkan ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar golongan penduduk, antar sektor kegiatan ekonomi maupun ketimpangan antar daerah. Sedangkan, berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga pengertian : kemiskinan natural alamiah, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin, karena dari sejak awal asalnya memang miskin. Kelompok masyarakat miskin ini karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam , sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, sehingga mereka tidak dapat ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapatkan imbalan pendapatan yang rendah. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan hasil pembangunan yang belum seimbang, termasuk jenis kemiskinan ini adalah kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Sedangkan kemiskinan kultural adalah mengacu pada sikap hidup seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya, dimana mereka sudah merasa berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mudah untuk melakukan perubahan, menolak untuk mengikuti perkembangan dan tidak ingin berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Akibatnya, tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran umum yang dipakai secara umum. Dengan ukuran absolut, misalnya

tingkat pendapatan minimum, mereka dapat dikatakan miskin. Tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau disebut miskin.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, kebijakan pembangunan sulit menjangkau mereka. Lain hal nya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan, memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Sedangkan, definisi menurut UNDP, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan.

Selanjutnya terdapat 2 (dua) masalah besar di banyak negara-negara berkembang (LCDs), termasuk di Indonesia, yaitu kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada dibawah garis kemiskinan (poverty line).

Beberapa indikator utama yang digunakan dalam kemiskinan, meliputi ;

- (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak;
- (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif;
- (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis;
- (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup;
- (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi;
- (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah;
- (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas;
- (8) dan sebagainya.

Langkah-langkah dalam menghilangkan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness nya tinggi. Ada 3 (tiga) pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni pertama, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan; kedua, pemerintahan yang baik (good governance) dan



ketiga, pembangunan sosial untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi - intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan bila dibagi menurut waktu yaitu : pertama ,intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi, dan ekonomi pedesaan; kedua, intervensi jangka menengah dan panjang yang meliputi : pembangunan sektor swasta, kerjasama regional , APBN dan administrasi, desentralisasi, pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan.

Data kemiskinan sebelum dan sesudah covid-19 di Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Data kemiskinan sebelum pandemi Covid-19

Persentase penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada bulan September 2019 mencapai 10,95 persen.

Penduduk miskin di Provinsi Sulbar mencapai 151,87 ribu orang atau sekitar 10,95 persen dari penduduk Sulbar penduduk miskin tersebut turun 0,27 poin atau 96 ribu orang, jika dibandingkan dengan kondisi September 2018 yang mencapai 11,22 persen atau 152,83 ribu orang.

Jika dibandingkan kondisi Maret 2019 penduduk miskin sebesar 151,40 ribu orang 11,02 persen, atau bertambah sebesar 47 ribu orang," ujarnya. persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 9,63 persen menurun menjadi 9,41 persen pada September 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2019 sebesar 11,45 persen menurun menjadi 11,43 persen pada September 2019.

No	Kabupaten / Kota	Jumlah penduduk miskin (000)	Persentase penduduk miskin	Garis kemiskinan (Rp/Bulan)
1	Majene	23,53	13,79	349.522

2	PolewaliMandar	69,68	15,97	366.355
3	Mamasa	21,22	13,38	249.103
4	Mamuju	20,42	7,18	252.429
5	MamujuUtara	7,65	4,53	330.226
6	MamujuTengah	9,28	7,14	236.699
	SulawesiBarat	151,78	11,25	319.121

2. Data kemiskinan Saat pandemi Covid-19

Pada bulan Maret 2020, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 10,87 persen atau menurun 0,08 persen poin dibandingkan September 2019 dan menurun 0,15 persen poin dibandingkan Maret 2019.

Secara absolute, jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Maret 2020 sebanyak 152,02 ribu jiwa, mengalami peningkatan sebesar 0,15 ribu jiwa jika dibandingkan September 2019 dan mengalami peningkatan sebesar 0,62 ribu jiwa jika dibandingkan Maret 2019.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 9,41 persen meningkat menjadi 9,59 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 11,43 persen menurun menjadi 11,26 persen pada Maret 2020.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar 77,17 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2019 yaitu sebesar 77,36 persen.

Pengangguran

Masalah pengangguran menurut Keynes dianggap sebagai wujud dalam perekonomian karena permintaan efektif yang wujud dalam masyarakat (pengeluaran agregat) adalah lebih rendah dari kemampuan faktor-faktor produksi



yang tersedia dalam perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa.

Terdapat beberapa definisi tentang pengangguran. Menurut ilmu kependudukan (demografi), orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok kependudukan yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan kategori usia, usia produktif angkatan kerja berusia 15-64 tahun. Tetapi, tidak semua orang yang berusia 25-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja. Penduduk yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk yang sedang bekerja pada usia produktif 15-64 tahun, sedangkan penduduk yang sedang mencari kerja, sedang mengurus rumah tangga atau sedang sekolah tidak termasuk dalam angkatan kerja.

Pengangguran dapat dibedakan menjadi 3 yaitu ; (1) pengangguran terselubung (Disguised Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu; (2) , setengah menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu; (3) pengangguran terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh - sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena belum mendapat pekerjaan, walaupun telah berusaha mencari pekerjaan secara maksimal.

Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran

Faktor penyebab terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut : (1) Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi. (2) Struktur Lapangan kerja tidak seimbang. (3) Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja,

pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia. (4) Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh Angkatan Kerja Indonesia. (5) Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja di suatu daerah mungkin lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

Dampak Pengangguran :

1. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran dapat menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.

2. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun, sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang, sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus mengalami penurunan.

3. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga permintaan terhadap barang - barang produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak menarik kalangan investor (pengusaha) untuk



melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian, tingkat investasi menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak mengalami peningkatan

Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu dan terhadap masyarakat pada umumnya :

- a. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian;
- b. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan;
- c. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.

Data pengangguran sebelum dan sesudah Covid-19 di Sulawesi Barat:

1. Data Pengangguran sebelum pandemi Covid-19

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,61 persen atau jumlah penduduk yang sedang menganggur pada bulan Februari tahun 2020 sebanyak 17,60 ribu orang. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar, Win Rizal, di Mamuju mengatakan dari 100 penduduk yang dikategorikan angkatan kerja, sekitar 2 sampai 3 orang di antaranya adalah pengangguran. Lapangan usaha pertanian merupakan penyerap terbesar tenaga kerja di Sulawesi Barat. Pada bulan Februari tahun 2020, jumlah penduduk yang bekerja pada kategori pertanian sebanyak 298.150 orang atau sebesar 45,42 persen dari jumlah penduduk yang bekerja.

Pekerja di Sulawesi Barat masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah yakni SMP ke bawah sebanyak 412.430 orang atau sekitar 62,83 persen. Selanjutnya, pekerja berpendidikan menengah yakni SMA dan SMK sebanyak 150.440 atau 22,2 persen. Pekerja yang memiliki pendidikan tinggi yakni diploma dan sarjana (S1) sebanyak 93.510 orang atau 14,25 persen. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sulawesi Barat pada bulan Februari 2020 sebesar 69,70 persen, berarti dari 100 penduduk usia kerja, sekitar 69-70 orang tergolong angkatan kerja yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran.

2. Data Pengangguran Saat Pandemi Covid-19

Tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Barat pada bulan Agustus tahun 2020 sebanyak 23,13 ribu orang. Artinya, kondisi pengangguran meningkat menjadi 2,85 ribu orang selama setahun terakhir dari Agustus 2019 - Agustus 2020.

Kepala BPS Sulbar, Agus Hendrayana Hermawan menyatakan banyak yang bisa dicermati dari dampak Covid-19, salah satunya banyak pekerjaan yang hilang di tengah pandemi Covid-19, yang menambah jumlah pengangguran.

“Hal ini dapat juga dilihat bukan saja dari angka pengangguran, tetapi angka bukan angkatan kerja karena Covid. Jadi, orang yang dulunya merupakan pekerja terlibat aktif di pasar kerja, akhirnya terpaksa menjadi bukan angkatan kerja akibat Covid-19, jelas Agus Hebdrayana Hermawan, dalam press rilis yang digelar virtual BPS Sulbar, Jumat (6/11/20). Selain itu, banyak penduduk sementara tidak bekerja dan tidak di PHK, namun di rumahkan untuk sementara waktu akibat pandemi Covid-19.

BPS Sulbar mencatat jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 696,12 ribu orang, naik 15,35 ribu orang dibanding Agustus 2019. Seiring dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat sebesar 0,30 persen. Dari 295,60 ribu orang, 3,15 ribu orang diantaranya merupakan bukan angkatan kerja akibat Covid-19, menurut survei angkatan kerja nasional (Sakernas).

Agus Hendrayana Hermawan menyatakan terdapat 120,52 ribu orang atau mencapai 12,15 persen dari penduduk usia kerja yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 18,43 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yang tercatat sebanyak 10,53 persen (BPS Sulbar dikutip dari lamannya).



Meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan selama masa pandemi Covid-19 disebabkan sebagai berikut :

a. Meningkatnya jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat

Pekerja di Sulawesi Barat masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah yakni SMP kebawah sebanyak 412.430 orang atau sekitar 62,83%. Selanjutnya, pekerja yang berpendidikan setingkat SMA dan SMK sebanyak 150.440 atau 22,92% dan yang memiliki pendidikan diploma dan sarjana (S1) sebanyak 93.510 orang atau 14,25%.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Barat pada Agustus 2020 sebesar 3,23% atau meningkat sebesar 0,34% di banding bulan Agustus 2019. Pada Agustus 2020, tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat sebanyak 23,13 orang artinya pada Agustus 2020 meningkat menjadi 2,85 ribu orang selama setahun terakhir dari Agustus 2019- Agustus 2020. Hal ini dapat dilihat bukan saja dari angka pengangguran, tetapi dari bukan angka kerja akibat pandemi Covid-19, jadi orang yang dahulunya merupakan pekerja terlibat aktif di pasar kerja akhirnya terpaksa menjadi bukan angkatan kerja saat pandemi Covid-19.

b. Meningkatnya angka kemiskinan

Beberapa program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, antara lain:

1. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok
2. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin
3. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat
4. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar
5. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin

Berdasarkan 5 program pemerintah tersebut di harapkan jumlah rakyat miskin dapat ditanggulangi sedikit demi sedikit.

Beberapa langkah teknis yang di galakkan pemerintah terkait 5 program tersebut yaitu menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok yang bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.

PENUTUP

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa termasuk meningkatnya kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Pandemi Covid-19 telah meng-ganggu mata rantai produksi industri dan kondisi perekonomian suatu daerah, sehingga perputaran bisnis menjadi tidak lancar sedangkan kewajiban para pengusaha tetap berjalan berakibat banyaknya karyawan yang dirumahkan bahkan harus rela kehilangan pekerjaan karena diPHK.

Khususnya kondisi penduduk Provinsi Sulawesi Barat, sumber daya manusia masih tergolong rendah menyebabkan sebagian besar masyarakat bekerja tanpa keahlian khusus dan tanpa kualifikasi pendidikan tinggi, sehingga penghasilan yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Semakin sulitnya mencari pekerjaan di Provinsi Sulawesi Barat pada masa pandemi saat ini, bulan Maret 2020, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan) sebesar 10,8% dan meningkat saat adanya pandemi Covid-19.

Secara absolute, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bulan Maret 2020 sebanyak 152,02 ribu jiwa, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 0,15 ribu jiwa jika dibandingkan September 2019 dan mengalami



peningkatan sebesar 0,62 ribu jiwa jika dibandingkan Maret 2019.

- Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 9,41 persen meningkat menjadi 9,59 persen pada Maret 2020.

- Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 11,43 persen menurun menjadi 11,26 persen pada Maret 2020. Badan pusat statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Barat pada Agustus 2020 sebesar 3,23% meningkat 0,34% dibandingkan pada bulan Agustus 2019.

- Pada Agustus 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat sebanyak 23,13 orang, artinya pada Agustus 2020 meningkat menjadi 2,85 ribu orang selama setahun terakhir dari Agustus 2019-Agustus 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, 2020, Dampak Covid-19 Terhadap ekonomi Indonesia, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Terhadap Masyarakat Universitas Batanghari Jambi
- [2] Fajar Hidayat, Nia Aminiah, M.SE, Parkit Handono, 2018, Data Dan Informasi , Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018 , Badan Pusat Statistik
- [3] Muhdar, 2015, Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran dan Kemiskinan Indonesia; Masalah dan Solusi
- [4] Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam
- [5] Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA, 6(1), 41–53.
- [6] <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- [7] <https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-pandemi-covid-19-pengangguran-dan-kemiskinan-diprediksi-mengalami-lonjakan-on Dec 04 2020>
- [8] <https://sulbaronline.com/2020/11/angka-pengangguran-sulawesi-barat/-on Dec 06 2020>
- [9] <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1469853/pengangguran-di-sulbar-februari-2020-capai-261-persen-on Dec 10 2020>
- [10] <https://sulbar.bps.go.id/news/2019/07/15/43/maret-2019--persentase-penduduk-miskin-di-sulawesi-barat-11-02-persen.html-on Dec 10 2020>
- [11] <https://sulbar.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/948/maret-2020--persentase-penduduk-miskin-di-sulawesi-barat-10-87-persen.html on Dec 11 2020>